

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi atau angkutan adalah pengangkutan orang/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu kendaraan di ruang lalu lintas jalan (Anandi, 2021). Transportasi darat di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satunya ialah angkutan umum, angkutan umum ini sekarang dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk berpergian dan membantu masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, selain itu memiliki peran yang sangat penting di sektor perekonomian, pendidikan, urusan pemerintahan dan kepentingan umum lainnya (Chotib, 2019).

Angkutan umum dari segi aksesibilitas memiliki fasilitas penunjang diantaranya terminal, halte, dan jalan yang mana dari 3 fasilitas ini merupakan simpul transportasi yang sangat perlu diperhatikan (Soimun, dkk., 2021). Perkembangan dan kemajuan transportasi di suatu wilayah harus juga diikuti dengan penyediaan prasarana transportasi yang memadai, prasarana yang memadai akan menunjang kegiatan atau aktifitas masyarakat sehari-hari, selain itu juga prasarana angkutan umum yang memadai akan membantu sarana transportasi berkembang serta meningkatkan pelayanan yang baik terhadap angkutan umum, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya permasalahan . Prasarana angkutan umum pun diperlukan untuk melayani masyarakat yang sehari-harinya bepergian dengan menggunakan angkutan umum (Wiratama dan Suryadjaja, 2023).

Dalam pembangunan prasarana transportasi, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah dimana sasaran pembangunan prasarana transportasi tersebut untuk mempertahankan tingkat pelayanan, meningkatkan aksesibilitas pelayanan yang meliputi aspek keselamatan, kelancaran dan kenyamanan serta keamanan pelayanan transportasi, maka perlu dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan prasarana (Sari dan Hu, 2019).

Salah satu prasarana menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah halte, halte merupakan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan atau lindungan (Sitohang dan Situmorang, 2019). Halte merupakan salah satu fasilitas publik yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan (Rusmandani dan Setiawan, 2020). sebagai fasilitas publik seharusnya dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna sesuai standar aturan yang berlaku sehingga penggunaan angkutan umum semakin kedepan semakin bertambah. Halte merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi perkotaan dan merupakan komponen dari infrastruktur transportasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk berpindah moda (Azamta, dkk., 2021).

Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng pada tahun 2023 terdapat 15 trayek angkutan pedesaan. Namun berdasarkan hasil kondisi eksisting yang kami lihat secara langsung dari 15 trayek angkutan pedesaan hanya ada 9 trayek angkutan pedesaan yang masih aktif sampai sekarang. Berdasarkan dari survei inventarisasi prasarana angkutan umum didapatkan data mengenai jumlah tempat pemberhentian angkutan pedesaan di Kabupaten Bantaeng yang berjumlah 13 halte yang tersebar pada trayek angkutan pedesaan tersebut, Pada trayek angkutan pedesaan trayek A1 dan K1 memiliki data jumlah naik dan turun penumpang yang tinggi yaitu sebesar 108 penumpang per hari pada trayek A1 dan 75 penumpang perhari pada trayek K1, sedangkan berdasarkan data inventarisasi prasarana terdapat beberapa halte yang kondisinya kurang baik sehingga perlu dilakukannya evaluasi karena belum memenuhi standar teknis yang berlaku. Fenomena yang terjadi pada wilayah studi Kasus Trayek A1 dan K1 masyarakat lebih sering menunggu angkutan umum tidak pada halte karena kondisi dan ketersediaan fasilitas halte, hal ini juga dipengaruhi karena masih kurang dan kebiasaan pengemudi yang menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukannya evaluasi dan identifikasi permasalahan terhadap fasilitas halte agar dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum apabila fasilitas halte dalam kondisi yang nyaman, aman, dan tertib sesuai fungsinya

(Bawana dan Rachmawati, 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam menyusun Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, penulis mengambil judul yaitu "Analisis Kebutuhan Halte Angkutan Umum Pada Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Trayek A1 dan Trayek K1)".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah digambarkan, identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kondisi fasilitas halte yang terletak di daerah Kabupaten Bantaeng belum sesuai dengan pedoman teknis, seperti belum memiliki papan nama/identitas halte, pagar pengaman, penerangan, tempat sampah, dan informasi trayek.
2. Lokasi penempatan halte yang kurang tepat dan halte terlalu jauh dari badan jalan sehingga tidak kelihatan keberadaannya membuat naik dan turunnya penumpang tidak pada halte dan kurang teratur.
3. Kurangnya penentuan titik dibangunnya lokasi halte dan desain halte yang belum sesuai dengan pedoman teknis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan dan kondisi fasilitas halte yang memenuhi standar pedoman teknis dan memenuhi kebutuhan yang berada di wilayah studi?
2. Dimana lokasi halte yang ideal berdasarkan permintaan dan tata guna lahan?
3. Bagaimana desain halte yang sesuai dengan kebutuhan penumpang dan dimensi yang sesuai dengan kebutuhan penumpang?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan fasilitas (halte) di Kabupaten Bantaeng pada trayek angkutan pedesaan (Studi Kasus Trayek A1 dan K1) sesuai dengan pedoman teknis agar penggunaan halte berfungsi dengan baik dan memberikan jaminan keselamatan serta kenyamanan

bagi pengguna angkutan umum dalam melakukan perpindahan moda. Tujuan dari penulisan kertas kerja wajib ini adalah sebagai:

1. Mengevaluasi fasilitas halte dengan mengkaji serta mengetahui kondisi eksisting halte secara langsung.
2. Menganalisis penentuan titik lokasi halte yang ideal berdasar pedoman teknis.
3. Memberikan usulan penyediaan fasilitas dan desain halte yang tepat.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bantaeng yang di lewati oleh jaringan trayek angkutan pedesaan yaitu pada Trayek A1 dan K1.
2. Melakukan analisis kebutuhan halte dan evaluasi fasilitas halte kondisi saat ini yang sesuai dengan pedoman teknis.
3. Menentukan titik tempat pemberhentian fasilitas halte berdasar kantong penumpang.
4. Membuat desain usulan halte.
5. Hanya mengkaji terkait dengan fasilitas halte tidak sampai biaya.